

TAJUK RENCANA

Lampu Kuning Miras Oplosan

LAGI-LAGI, korban minuman keras (miras) oplosan berjatuhan. Dalam beberapa hari ini, tujuh orang tewas akibat minuman memabukkan itu. Lima orang warga Bantul, dan dua orang warga Kulonprogo. Mereka berpesta minuman haram tersebut di tempat berbeda, juga dengan cara berbeda. Untuk warga Kulonprogo, keduanya membeli miras kurang lebih ukuran 1 liter, 2 botol bir, 1 kaleng ginseng dan minuman soda 2 botol ukuran 600ml. Minuman tersebut dioplos di dalam mobil kemudian diminum sambil karaoke di kawasan Pantai Samas Bantul.

Hilangnya nyawa akibat miras oplosan yang disebut Sanres bukan kali ini saja. Berdasarkan catatan, pada Juni lalu seorang pelajar SMK Bantul juga merengas nyawa usai menenggak miras oplosan. Beberapa bulan sebelumnya, pertengahan Oktober 2022, tiga orang bersaudara warga Bantul. Selain itu masih ada lagi, misalnya Februari 2017 lima orang mati konyol usai pesta miras oplosan. Bahkan pada Mei 2016 korban miras oplosan di Bantul mencapai 13 orang. Jumlah yang tidak sedikit.

Apakah di masa-masa mendatang korban miras oplosan masih akan berjatuhan? *Wallahu allam*. Tapi melihat data, minimal sejak Mei tahun 2016, ternyata sampai sekarang korban miras oplosan masih ada. Orang yang menjual miras ilegal juga masih ada. Kemungkinan orang yang mengkonsumsi juga ada. Padahal aparat kepolisian terus melakukan operasi miras ilegal, juga pernah menangkap penjual miras oplosan. Dengan kasus 7 orang meninggal belakangan ini, pasti pihak berwajib juga lantang melakukan tindak lanjut terkait peredaran miras.

Yang pasti, berjatuhnya korban miras ini merupakan *warning* atau peringatan bagi kita semua. Harapannya, adanya lampu kuning ini mestinya mengingatkan kita semua untuk kian mewaspadai

peredaran miras ilegal sehingga tidak jatuh korban lagi di masa-masa mendatang. Jangan sampai kita, saudara kita, tetangga dan kawan-kawan kita mengkonsumsi minuman memabukkan. Jangan sampai juga di antara kita menjual minuman keras.

Di Indonesia, peredaran minuman beralkohol atau minuman keras diatur ketat dengan sejumlah peraturan, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Pada pasal 7 Perpres 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol disebutkan, minuman beralkohol golongan A (kadar etil alkohol atau etanol sampai 5 persen, golongan B (kadar 5-20 persen), dan golongan C (kadar 20-55 persen) hanya dapat dijual di hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.

Kemudian Pasal 8 berbunyi, Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol Golongan A, Golongan B, dan Golongan C dan minuman beralkohol yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan/atau bahan alami serta memproduksi minuman beralkohol dengan cara racikan atau oplosan.

Jadi secara regulasi sudah jelas. Sekarang tinggal bagaimana masyarakat mematuhi-hnya. Untuk itu tentu saja dibutuhkan peran aktif dari semua lapisan masyarakat. Misalnya, kalau mengetahui adanya penjualan miras yang tidak sesuai ketentuan segera laporkan kepada pihak berwajib. Begitu juga kalau ada anggota keluarga, sanak saudara atau handai taulan mengkonsumsi miras juga harus diingatkan, jangan diabaikan. Kalau menjadi korban bukan hanya dirinya sendiri yang menyedal di akhirat, tetapi keluarga dan orang-orang terdekatnya juga pasti akan ikut menanggung malu.

Karena itu, mari kita jauhi segala bentuk minuman memabukkan. Jangan sampai jatuh korban lagi. □-d

SISWI kelas 2 SDN di Gresik Jawa Timur itu mengalami kebutaan permanen pada mata kanan, akibat kekerasan fisik yang dilakukan kakak kelas setelah ia menolak dipalak. Perbincangan dan kasus SAH yang mata kanannya dicolok tusuk sate, belum usai. Kini, berjarak ratusan kilometer seorang pelajar SMPN di Cimanggu Cilacap, RF harus dirawat di rumahsakit karena mengalami patah tulang rusuk, akibat perundungan. Ia dipukul, ditendang, diseret oleh teman yang mengenalkan seragam yang sama.

Dunia pendidikan sedang tidak baik-baik saja. Perundungan kembali marak di sekolah. Realita yang menjadi ancaman besar bagi masyarakat terutama satuan pendidikan. Media mencatat, Federasi Serikat Guru Indonesia (FS-GI) menyebut terjadinya 16 kasus selama periode Januari - Juli 2023. Sementara Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkap adanya 64 aduan kekerasan pada anak di satuan pendidikan.

Serangkaian tindak kekerasan terhadap anak terjadi di Indonesia: kekerasan seksual, pembunuhan, penelantaran, perundungan, perdagangan anak dan lainnya. Membuat miris, kasus perundungan marak dengan korban dan pelaku adalah anak-anak sekolah, bahkan masih duduk di bangku SD. Dimana keteladanan dan pendidikan karakter? Sekolah yang mestinya steril kekerasan ternyata bak api dalam sekam: menyimpan perilaku kekerasan bahkan sejak anak masih di bangku SD.

KEKERASAN terhadap anak tetap menjadi hantu menakutkan, yang mengancam masa depan Indonesia. Dunia pendidikan bahkan bisa dikatakan terlenda darurat perundungan. Menjadi pertanyaan ketika solusi yang dilakukan pemerintah bukan melakukan kajian mendalam untuk mengurai benang kusut yang mengakibatkan terjadinya perundungan. Namun lewat Kementerian Dikbud-Ristek dikeluarkan Permendik-

Fadmi Sustiwi

bud-Ristek No 46/2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Di dalam pasal 6 termuat bentuk kekerasan yang ditabukan ialah: kekerasan, fisik, kekerasan psikhis, perundungan, kekerasan seksual.

Realita perundungan ini membuat Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah mencari solusi. Ia bahkan meminta ada penanganan khusus. Negara menurutnya tidak boleh



KR-JOKO SANTOSO

membiarkan kasus perundungan tanpa solusi yang komprehensif. Tentu bukan sekadar regulasi menteri. Mengingat kita juga sudah memiliki UU No 35 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun bagaimana pelaksanaan aturan dalam keseharian-lah yang diperlukan.

Sekolah yang semestinya menjadi tempat nyaman dan aman membangun karakter dan peradaban, sudah menjadi tempat menakutkan dan penuh ancaman bagi sebagian anak. Kian miris, karena apa yang terucut hanyalah fenomena gunung es. Artinya, angka kejadian perun-

Menanti Capres yang Peduli Perundungan

dungan lebih besar dari pada yang terlaporkan. Sebagaimana dalam kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, banyak kekerasan terhadap anak 'didiadakan', diselesaikan secara kekeluargaan tragisnya kadangkala dianggap hanya sebagai hal sepele kenakalan anak-anak.

SAAT ini, Indonesia dalam gegap gempita tahun politik. Yang membuat prihatin, tidak ada seorang calon presiden (capres) di dari 3 yang sudah diunggulkan — pernah bicara soal perundungan, apalagi memberikan solusi pencegahan dan pemutusan mata rantainya. Padahal seperti disebut Ketua DPR RI, apa yang terjadi telah membuat Indonesia berada pada situasi darurat perundungan.

Bangsa ini akan memasuki Indonesia Emas 20 tahun mendatang. Saat itu, anak-anak yang menjadi pelaku di juga korban — perundungan inilah yang akan mengisi dan membawa Indonesia ke masa depan. Akankah kita membiarkan anak-anak muda yang bar-bar akan memimpin Indonesia masa depan?

Masyarakat menanti capres yang peduli akan kasus-kasus perundungan. Capres yang bisa memberikan keteladanan dan solusi agar perundungan tidak terus terjadi. Capres yang memiliki empati pada korban perundungan dan mampu memulihkan kepercayaan diri. Sehingga gagah menuju Indonesia Emas 2045. Bukan malah membuat Indonesia Cemas. □-d

*) **Fadmi Sustiwi**, jurnalis *Kedaulatan Rakyat*, peduli kesetaraan sosial dan anak

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email: opini@kr.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Demokrasi Sehat dan Berkeadaban

M Taufiq AR

lam meningkatkan IDI, berikut ini adalah beberapa rekomendasi bagi pilar-pilar demokrasi, yakni pemerintah daerah, masyarakat sipil, dunia usaha, akademisi, dan pegiat media massa. *Pertama*, penguatan pendidikan demokrasi. Perlu segera implementasikan program pendidikan demokrasi di sekolah-sekolah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran warga muda tentang demokrasi. Pemilih (pemilihan pengurus OSIS) dapat menjadi wahana pendidikan dan penghayatan demokrasi sejak belia.

Kedua, peningkatan transparansi dan partisipasi publik. Pemda perlu secara sadar dan tulus terus meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam proses perencanaan pembangunan dan penganggaran publik. Aktifkan portal informasi yang mudah diakses masyarakat secara inklusif (termasuk bagi kelompok masyarakat penyandang disabilitas, lansia, maupun kelompok rentan lainnya dalam perspektif GED-SI (*Gender Equity, Disability, and Social Inclusion*)).

Independensi Media
Ketiga, peningkatan pemberantasan korupsi. Pemda perlu meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa serta implementasikan mekanisme pengaduan korupsi yang efektif. Masyarakat sipil berperan mendukung pemantauan tindak korupsi dan bekerjasama dengan lembaga anti-korupsi untuk memberantas praktik korupsi. *Keempat*, meningkatkan praktik inklusi dan kesetaraan dengan men-

gadopsi perspektif GEDSI.

Kelima, menggaransi independensi media massa dan etika media. Pegiat media massa perlu mendukung perkembangan media independen yang etis dan bebas dari pengaruh politik praktis serta berkomitmen tinggi pada kode etik jurnalistik. *Keenam*, memperkuat kemitraan dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Dengan memperhatikan kepentingan masyarakat serta mempromosikan nilai-nilai etika dan kebudayaan.

Pemantapan demokrasi harus menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat sipil, dunia usaha, akademisi, dan pegiat media massa. Kolaborasi dan komitmen dari semua pihak sangat penting untuk demokrasi yang lebih sehat, inklusif, dan berkeadaban, yang selaras dengan visi Indonesia Emas 2045. □-d

*) **M. Taufiq AR**, *Perencana pada BAPPEDA DIY, Wakil Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PWM DIY.*

Pojok KR

KPK geledah dua rumah pribadi Syahrul -- Usut tuntas segala bentuk korupsi.

717.850 liter solar diamankan.

-- Hentikan setiap penyelewengan.

Hadapi El Nino, BNPB operasi darat-udara.

-- Minimalkan dampak yang dirasakan masyarakat.

Beraba

PIKIRAN PEMBACA
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55233. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Saatnya Membersihkan Selokan Lingkungan

SAAT ini panas dan hampir bisa dikatakan tiada hujan. Meski ada prediksi kemarau lebih panjang, namun harapan hujan sebentar lagi akan turun tetap ada dalam diri setiap orang. Bagaimanapun, kondisi panas menyengat bukan saja membuat tidak sehat, namun juga bisa membuat petani keclimpungan.

Saat ini sejatinya menjadi waktu tepat bagi warga untuk membersihkan selokan air yang ada di lingkungan. Tujuannya satu, membuat bersih agar tidak memampatkan jalan air. Sehingga ketika hujan datang, saluran air atau selokan di lingkungan sudah

bersih, tidak ada sumbatan dan air bisa lancar mengikuti alurnya. Sementara, pemerintah juga bisa menurunkan ar-madanya untuk member-sihkan gorong-gorong di jalan. Agar sampah yang sengaja maupun tidak sengaja dimasuk-kan, tidak menyumbat jalan air ketika hujan datang.

Sedia payung sebelum hujan, adalah peribahasa. Namun bersiap dengan membersihkan selokan/saluran air lingkungan sebelum hujan datang, agar tidak terkena banjir, adalah aksi nyata. □-d

*) **Fariza, Minomartani Ngaglik Sleman**

Kedaulatan Rakyat
SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurika Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo S.Sos.
Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tang-gungjawab percetakan
Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.
Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.
Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Samarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guño Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

Pemimpin Umum: M Wirnon Samawi SE MIB. **General Manager :** H Yoeke Indra Agung Laksana, SE. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Dra Hj Fadmi Sustiwi, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi S.Sos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari S.Sos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grasis :** Joko Santoso S.Sn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrky23@yahoo.com, iklankrky13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm . Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)